

2024



RENJA SKPD

KECAMATAN PUDING BESAR KABUPATEN BANGKA

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
PUDING BESAR
2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Tahun 2024 sebagai salah satu dokumen perencanaan program dan kegiatan dapat diselesaikan dengan baik. Rancangan Akhir Rencana Kerja (Ranhir Renja) Kecamatan Kecamatan Puding Besar Tahun 2024 ini berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Tahun 2022, Tujuan, Sasaran, dana Indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan.

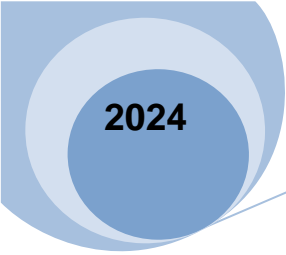
Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Tahun 2023 sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan salah satu bentuk perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat komprehensif, karena didalamnya menyampaikan tentang kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran serta sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Puding Besar Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Tahun 2023 sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan salah satu bentuk perencanaan Organisasi Perangkat Daerah yang bersifat komprehensif, karena didalamnya menyampaikan tentang kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun anggaran serta sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Puding Besar Tahun Anggaran 2024.

Puding Besar, April 2023
CAMAT PUDING BESAR



ARIE PAMUNGKAS,S.STP,M.Si
PENATA TK.I
NIP. 19841130 200212 1 002



DAFTAR ISI

SAMPUL..... 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

DAFTAR TABEL 3

BAB.I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 5

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB.II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.. 9

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah 9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 19

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 20

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 24

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .. 30

BAB.III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 31

3.1 Telaah terhadap kegijakan Nasional 31

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah..... 34

3.3 Program dan Kegiatan 35

BAB.IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .. 39

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024 39

BAB.V : PENUTUP 47

LAMPIRAN..... 49

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Capaian IKU Tahun 2022 9

TABEL TC. 29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun lalu 11

TABEL TC. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan PD 20

TABEL TC. 31 Review Terhadap Rancangan Akhir SKPD Kabupaten..... 25

TABEL TC. 32 Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat OPD 30

TABEL 4.1 Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerahnya.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Rencana Kerja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/ paralel dengan penyusunan Renja Perangkat Daerah, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi Perangkat Daerah dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu. Tahapan penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
 24. Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan SOTK masing-masing Perangkat Daerah;

25. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);
26. Peraturan Bupati Bangka Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 24);
27. Peraturan Bupati Bangka Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 33);
28. Peraturan Bupati Bangka Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 37);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Akhir Kerja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2024 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Renja Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024 ini adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 Lingkup Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sistematisa penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematisa Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA OPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu (2022) dan Capaian Renstra OPD

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun 2022. Pada tahun 2022 Kantor Kecamatan Puding Besar melaksanakan 5 (Lima) program, 11 (Sebelas) Kegiatan dan 19 (Sembilan belas) Sub Kegiatan dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD Perubahan sejumlah **Rp. 3.476.463.860,00** (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus enam puluh rupiah). Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran **Rp. 2.887.442.447,00** (Dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) atau sebesar **83,06%**.

Selanjutnya berdasarkan pengukuran kinerja atas indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 dan diperjanjikan secara tahunan berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, capaian IKU Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1

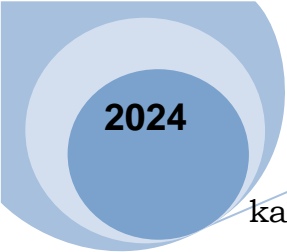
Capaian Indikator Kinerja Utama

Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka

Tahun 2022

No	Indikator	Capaian 2022	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian s/d 2024 terhadap Target Renstra (%)
			Target	Realisasi	%		
1.	Persentase Desa/Kelurahan Berkembang (Permendagri 81/2015)	44,44	100	100	100,00	100,00	100,00

Secara umum capaian kinerja Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka sampai dengan tahun 2022 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Puding Besar 2019-2023. Capaian atas indikator dapat dinyatakan berhasil



karena rata-rata telah sesuai dengan target yang ditetapkan Persentase Desa Berkembang mencapai 100 persen dari target akhir Renstra.

Selanjutnya capaian evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dalam tabel TC.29. dibawah ini :

Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022
Kabupaten Bangka
Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Terhadap RKP
Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka
Periode Pelaksanaan : Triwulan I Tahun 2022

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Mengacu Pada Sasaran RPJMD :

1. Tujuan Renstra Kecamatan Puding Besar : Meningkatnya Kemandirian Desa
Indikator Tujuan Renstra : Persentase Desa Maju
2. Sasaran Strategis Renstra Kecamatan Puding Besar : Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa
Indikator Sasaran Renstra : Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015)
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan
- Nilai Evaluasi AKIP

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2023) Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											I				II				III				IV										
											K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp								
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		11		11		13		14 = 7 + 13		15 = 14/6 x 100%		16						
		7			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
		7.01	URUSAN KEWILAYAHAN																														
		7.01	BIDANG URUSAN KECAMATAN																														
1	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (30)	27,00	3.911.307.840			27,00	3.911.307.840	0,00	537.870.093									0,00	537.870.093	0,00	537.870.093	0	13,75	KEC.PUDING BESAR						
				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah (15)	11,35				11,35		0,00																						
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah			Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI (%)	0,00				0,00		0,00																						
	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah			Indeks Profesionalisme Aparatur Lingkup Perangkat Daerah	60,75				60,75		0,00																						
	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Perangkat Daerah			Indeks Sarana dan Prasarana	100				100		0,00																						
	Meningkatnya Efektivitas Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah			Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	2,05				2,05		0,00																						
	Meningkatnya perencanaan kinerja sesuai standar	7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar (%)	100	13.750.000			100	13.750.000		-		-		-		-		-		-		-		-							
	Meningkatnya pelaporan kinerja sesuai standar			Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar (%)	100	13.750.000			100	13.750.000																							
	Terlaksananya perencanaan kinerja sesuai standar	7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun (dokumen)	6	5.650.000			6	5.650.000	0,00	2	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	2	-	2	-	33,33	0,00						
		7.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	5	840.000			5	840.000	0,00	1	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1	-	1	-	20,00	0,00						
		7.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	2	840.000			2	840.000		2																					

		7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	172.817.290		12	172.817.290	25,00	3	30.532.190	0,00	0		0,00	0		0,00	0		25,00	3	30.532.190	3	30.532.190	25,00	17,67	
		7.01.01.2.06.10	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD(dokumen)	12	56.834.280		12	56.834.280	25,00	3	9.159.756	0,00	0		0,00	0		0,00	0		25,00	3	9.159.756	3	9.159.756	25,00	16,12	
		7.01.01.2.06.11	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12	56.834.280		12	56.834.280	25,00	3	9.159.756	0,00	0		0,00	0		0,00	0		25,00	3	9.159.756	3	9.159.756	25,00	16,12	
		7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	160.475.665		100	160.475.665	100,00		48.060.000	100,00		-	100,00		-	100,00		-	100,00		48.060.000		48.060.000	100		
		7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan (paket)	1	48.788.950		1	48.788.950	0,00	1	48.060.000				0,00			0,00			0,00	1	48.060.000	1	48.060.000	100,00	98,51	
		7.01.01.2.07.06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	9	49.136.715		9	49.136.715	0,00	0	-	0,00			0,00			0,00			0,00	0	-	0	-	0,00	0,00	
		7.01.01.2.07.09	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	1	62.550.000		1	62.550.000	0,00	0	-	0,00																
		7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan (%)	100	574.266.985		100	574.266.985			127.964.531	0,00		-	0,00		-	0,00		-			127.964.531		127.964.531			
				Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi (Layanan)	3			3				0,00				0,00			0,00										
		7.01.01.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (laporan)	12	447.376.545		12	447.376.545	25,00	3	99.831.292	0,00	0		0,00	0		0			0,00	3	99.831.292	3	99.831.292	25,00	22,31	
		7.01.01.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	39.417.360		12	39.417.360	25,00	3	10.944.200	0,00	0		0,00	0		0			0,00	3	10.944.200	3	10.944.200	25,00	27,76	
		7.01.01.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	12	87.473.080		12	87.473.080	25,00	3	17.189.039	0,00	0		0,00	0		0			0,00	3	17.189.039	3	17.189.039	25,00	19,65	
		7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik (%)	100	308.387.140		100	308.387.140	0		14.926.478	0,00		-	0,00		-	0,00		-	100		14.926.478		14.926.478			
		7.01.01.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	9	67.657.140		9	67.657.140	33	3	14.926.478	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	3	14.926.478	3	14.926.478	33,33	22,06	
		7.01.01.09.06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (unit)	6	14.750.000		1	14.750.000	0,00	0	-	0,00			0,00	0		0,00			0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
		7.01.01.09.009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (unit)	1	225.980.000		1	225.980.000	0,00	0	-	0,00			0,00	0		0,00			0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										12,88		13,75	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		13,75			24,81	14,34	
Predikat Kinerja										SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR			SR	SR	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	86	7.450.000		77,99	7.450.000	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	0,00		0	0,00	KEC.PUDING BESAR
	Meningkatnya Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	7.01.02.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	100	7.450.000		100	7.450.000	100		-			-			-			-			-	0,00		0	0,00	
	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	7.01.02.2.04.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	12	7.450.000		12	7.450.000	25,00	3	-	0,00	0		0,00	0		0,00	0		0,00	3	-	3		25,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										25,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
Predikat Kinerja										SR		0,00	SR		SR	0,00		SR	SR		SR	SR		SR			0,00	SR	

3	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Lembaga Masyarakat yang Aktif	100	97.530.000			100	97.530.000	0,00		38.674.835	0,00		-	0,00		-	2,00		-	2,00		38.674.835	2,00	38.674.835		39,65	KEC.PUDING BESAR
	Meningkatnya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	100	97.530.000			100	97.530.000			38.674.835			-			-			-			38.674.835		38.674.835			
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan			Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam Musrenbang	100				100																					
				Persentase Desa yang mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kec.	100				100																					
				Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam gotong royong	100				100																					
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaga)	49	8.940.000			49	8.940.000	100	49	7.225.000	0,00	0	-	0,00	0	-	0,00	0	-	100	49	7.225.000	49	7.225.000	100,00	80,82	
	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26	88.590.000			26	88.590.000	23,08	6	31.449.835	0,00	0		0,00	0		0,00	0		23,08	6	31.449.835	6	31.449.835	23,08	35,50	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											61,54		39,65	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	61,54		39,65			61,54	58,16	
Predikat Kinerja											R		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	R		SR			R	R	
4	Meningkatnya Desa yg masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya	7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Desa yang masyarakatnya aktif menjaga Trantibum secara swadaya (%)	100	14.150.000			100	14.150.000	0,00		75.000	25,00		-	0,00		-	0,00		-	25,00		75.000	25,00	75.000	100,00	0,53	KEC.PUDING BESAR
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*****	Persentase Tomas/Toga/Topa yg berperan aktif menjaga trantibum (%)	100	14.150.000				14.150.000			75.000			-			-			-			75.000		75.000	100,00	0,53	
	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	7.01.04.2.01.02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat*****	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	24	14.150.000			24	14.150.000	25,00	6	75.000	25,00	6	-	25,00	6	-	25,00	6	-	100,00	24	75.000	24	75.000	100,00	0,53	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)											25,00		0,53	25,00		0,00	25,00		0,00	25,00		0,00	100,00		0,53			100,00	0,53	
Predikat Kinerja											SR		SR	SR		SR	SR		SR	SR		SR	ST		SR			ST	SR	
5	Meningkatnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)	100	23.750.000			100	23.750.000	17,39		-	0,00		-	0,00		-	0,00		-	17,39		-	17,39		-	0,00	KEC.PUDING BESAR
				Persentase Desa yang Mengelola Keuangan Sesuai Standar	100				100																					
	Meningkatnya Pembinaan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa melaksanakan up dating profil desa sesuai standar	100				100	23.750.000			-			-			-			-			-		-			

2024

[illegible]

DISUSUN
Puding Besar 05 April 2023
CAMAT PUDING BESAR


ARIE PAMUNGKAS, S.STP, M.Si
PENATA TK I / III D
NIP. 19841130 200212 1 002

DIEVALUASI
Sungailiat, 07 April 2022
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA

Ir. PAN BUDI MARWOTO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19661214 199203 1 004

Terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2022 sebagaimana tersaji pada tabel diatas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja/Keluaran :

Sehubungan dengan kejadian luar biasa pandemi Covid 19, terdapat beberapa perubahan dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka 2022. Terdapat beberapa program yang dihilangkan pelaksanaannya dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2022. yang memaksa penyesuaian terhadap target kinerja yang ingin dicapai. Kondisi ini juga menyebabkan Kantor Kecamatan Puding Besar melakukan penyesuaian atas target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022 yang dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Beberapa Program/Kegiatan/Sub kegiatan Kantor Kecamatan Puding Besar pada Tahun 2022 yang mengalami kebijakan refocusing antara lain :

- I Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
- I.1 Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- I.1.1 Sub.Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- I.1.2 Sub.Kegiatan : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- I.2 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub.Kegiatan : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Refocusing anggaran atas kegiatan-kegiatan tersebut mempengaruhi beberapa target kinerja Kantor Kecamatan Puding Besar sehingga dilaksanakan penyesuaian target kinerja melalui Perubahan Perjanjian Kinerja pada tahun anggaran 2022.

Selanjutnya capaian atas target kinerja tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam penyusunan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Puding Besar Tahun 2024.

b. Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja/keluaran

- | | | |
|-------|--------------|---|
| I | Program | : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota |
| I.1 | Kegiatan | : Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| I.1.1 | Sub.Kegiatan | : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| I.1.2 | | : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| I.2 | Kegiatan | : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |
| I.2.1 | Sub.Kegiatan | : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| I.3 | Kegiatan | : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |
| I.3.1 | Sub.Kegiatan | : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya |
| I.4 | Kegiatan | : Administrasi Umum Perangkat Daerah |
| I.4.1 | Sub.Kegiatan | : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| I.4 | Kegiatan | : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| I.4.1 | Sub.Kegiatan | : Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| I.4.2 | | : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| I.4.3 | | : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |
| I.5 | Kegiatan | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang |

Urusan Pemerintahan Daerah

- I.5.1 Sub.Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- I.5.2 : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- II Program : Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
- II.1 Kegiatan : Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
- II.1.1 Sub.Kegiatan : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
- II.1.2 : Peningkatan Efektifitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- III Program : Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
- III.1 Kegiatan : Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- III.1.1 Sub.Kegiatan : Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- IV Program : Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- IV.1 Kegiatan : Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa
- IV.1.1 Sub.Kegiatan : Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pendayagunaan Aset Desa
- c. Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran
Tidak terdapat program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran.
- d. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Ada beberapa faktor penyebab tidak tercapai, terpenuhi atau melebihi target kinerja :

1. Kapasitas aparaturn Kantor Kecamatan Puding Besar yang mampu menyelesaikan kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.
2. Terlaksananya koordinasi antar sektor terkait.
3. Untuk kegiatan yang melebihi target, disebabkan karena terjadi beberapa tambahan kebutuhan dalam rangka menunjang operasional tugas Kantor Kecamatan Puding Besar dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran yang ada.
4. Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan dengan aktifnya masyarakat mengikuti musrenbang desa/kelurahan.
5. Meningkatnya kualitas pendampingan perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan oleh Bappeda dan Perangkat Daerah terkait lainnya.
6. Perencanaan kegiatan yang kurang akurat
7. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill sesuai kompetensi dan tugas utamanya.
8. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tahun 2023 Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka tetap menyelenggarakan urusan pemerintahan unsur kewilayahan, berdasar nomenklatur Kepmendagri Nomor 050-3798 Tahun 2020, dimana Kecamatan Puding Besar akan melaksanakan 5 (lima) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) subkegiatan.

Selanjutnya pada tahun 2022 Kantor Kecamatan Puding Besar melaksanakan urusan pemerintahan, dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel T-C.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kantor Kecamatan Puding Besar
Kabupaten Bangka

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Tahun Ke				Realisasi Capaian (%)		Proyeksi (%)	
				2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015)	-	-	44,44	85,71	100	100	44,44	85,71	100	100

Dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), Kantor Kecamatan Puding Besar telah memenuhi target untuk seluruh indikator. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja Kantor Kecamatan Puding Besar yang baik.

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka.

2.3.1. Tingkat Pelayanan Kantor Kecamatan Puding Besar

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas : Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum; Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa; Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum; Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum; Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan; Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan; Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan; Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Kantor Kecamatan Puding Besar mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Selanjutnya dalam Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Puding Besar Tahun 2024-2026 ditetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis yang pencapaiannya diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja utama yaitu:

1. Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan
3. Meningkatnya desa yang masyarakatnya aktif menjaga trantibum secara swadaya
4. Meningkatnya kualitas pelayanan

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Puding Besar.

Dalam Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka terdapat beberapa isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Bangka kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Bangka;
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan **Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)**, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Pelayanan Prima. Kecamatan Puding Besar sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Bangka yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,

menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;

2.3.3. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Kantor Puding Besar

Kantor Kecamatan Puding Besar memiliki peluang besar dalam meningkatkan pelayanan publik dalam mengawal pembangunan daerah menuju Bangka Sejahtera Tahun 2024. Dalam usaha pencapaian Tantangan dan peluang pembangunan yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Puding Besar adalah sebagai berikut :

- Pentingnya peran Kantor Kecamatan Puding Besar yang didukung oleh peraturan yang berlaku;
- Tingginya kepercayaan Bupati dan OPD terhadap keberadaan Kantor Kecamatan Puding Besar dalam hal pelayanan prima kepada masyarakat
- Kualitas SDM Kantor Kecamatan Puding Besar yang handal dan memadai sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan;
- Penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan tetap mengikuti perkembangan teknologi tersebut;
- Tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang memadai;
- Tersedianya SOP dalam pemberian pelayanan

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RPD/Renstra OPD.

Rancangan Akhir RKPD tahun 2023 menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja OPD tahun 2023. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan OPD Kantor Kecamatan Puding Besar. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Akhir RKPD dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD/Renstra OPD
Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2023

OPD : KECAMATAN PUDING BESAR

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan					Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Indeks Kepuasan Masyarakat	88 (90,00)	239.680.000,00			Indeks Kepuasan Masyarakat	88 (90,00)	239.680.000,00	
							Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai smp	100,00%				Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai smp	100,00%		
7	01	02	2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100%	15.000.000,00		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP	100%	15.000.000,00
7	01	02	2	02			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100%	15.000.000,00		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu	100%	15.000.000,00
7	01	02	2	02	0003		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	15.000.000,00		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 laporan	15.000.000,00
							Persentase Desa Mandiri	28,57%				Persentase Desa Mandiri	28,57%		
7	01	03					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	100%	117.530.000,00		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang	100%	117.530.000,00
7	01	03						Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif	100%	
7	01	03	2	01			Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrenbang desa/ke/kecamatan	100%	117.530.000,00		Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrenbang desa/ke/kecamatan	100%	117.530.000,00
7	01	03	2	01				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	100%	117.530.000,00			Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	100%	117.530.000,00
7	01	03	2	01	0001		Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	49 lembaga	10.000.000,00		Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	49 lembaga	10.000.000,00
7	01	03	2	01	0003		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 laporan	107.530.000,00		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 laporan	107.530.000,00

7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	100%	14.150.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum	100%	14.150.000,00	
7	01	04	2	01		Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Terlaksananya koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa	100%	14.150.000,00	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Terlaksananya koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa	100%	14.150.000,00	
7	01	04	2	01	0002	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	14.150.000,00	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 laporan	14.150.000,00	
7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100%	93.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	100%	93.000.000,00	
7	01	06	2	01		Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monev	100%	93.000.000,00	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monev	100%	93.000.000,00	
7	01	06	2	01	0003	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	140 dokumen	73.000.000,00	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	140 dokumen	73.000.000,00	
7	01	06	2	01	0009	Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	10.000.000,00	Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 dokumen	10.000.000,00	
7	01	06	2	01	0017	Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	1 Laporan	10.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	1 Laporan	10.000.000,00	

								Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	30,27				Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	30,27		
								Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	88 (73,20)				Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	88 (73,20)		
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	26,78	3.689.528.800,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA		Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah	26,78	3.689.528.800,00	
								Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11,38				Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah	11,38		
7	01	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	20.000.000,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	20.000.000,00	
								Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%		
7	01	01	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	6 Dokumen : Dokumen Renja, Dokumen Perubahan Renja, Perkin, Perkin Perubahan, Dokumen Rencana Aksi, Dokumen	10.000.000,00	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	6 Dokumen : Dokumen Renja, Dokumen Perubahan Renja, Perkin, Perkin Perubahan, Dokumen Rencana Aksi, Dokumen	10.000.000,00	
7	01	01	2	01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Laporan : Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan : Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah, Laporan LKPI Perangkat Daerah, Dokumen Laporan Tahunan	10.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Laporan : Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan : Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah, Laporan LKPI Perangkat Daerah, Dokumen Laporan Tahunan	10.000.000,00	
								Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%				Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI	0%		
7	01	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%	2.394.477.200,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	100%	2.394.477.200,00	
7	01	01	2	02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/14 bulan Gaji (15 Laki-laki dan 4 Perempuan)	2.374.477.200,00	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/14 bulan Gaji (15 Laki-laki dan 4 Perempuan)	2.374.477.200,00	
7	01	01	2	02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	15.000.000,00	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	15.000.000,00	
7	01	01	2	02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	42 Laporan (12 Dokumen Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD)	5.000.000,00	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	42 Laporan (12 Dokumen Laporan Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD)	5.000.000,00	

[illegible]

7	01	01	2	08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	574.931.100,00	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	574.931.100,00	
7	01	01	2	08	0001 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	447.376.545,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	447.376.545,00	
7	01	01	2	08	0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	39.854.555,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	39.854.555,00	
7	01	01	2	08	0004 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	87.700.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	87.700.000,00	
							Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%				Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik	100%		
7	01	01	2	07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penambahan aset perangkat daerah	27,46%	229.650.000,00	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penambahan aset perangkat daerah	27,46%	229.650.000,00	
7	01	01	2	07	0002 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan	2 Unit Motor	70.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan	2 Unit Motor	70.000.000,00	
7	01	01	2	07	0005 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	20 Unit	46.650.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	20 Unit	46.650.000,00	
7	01	01	2	07	0006 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	38.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit	38.000.000,00	
7	01	01	2	07	0009 Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	75.000.000,00	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit	75.000.000,00	
7	01	01	2	09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	18,91%	111.450.000,00	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah yang dipelihara	18,91%	111.450.000,00	
7	01	01	2	09	0002 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit Mobil, 6 Unit Motor	68.000.000,00	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit Mobil, 6 Unit Motor	68.000.000,00	
7	01	01	2	09	0006 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 unit	18.450.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	27 unit	18.450.000,00	
7	01	01	2	09	0009 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	25.000.000,00	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.P.Besar Kab.Bangka	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	25.000.000,00	
JUMLAH									3.929.208.800,00						3.929.208.800,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kantor Kecamatan Puding Besar didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan awal Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Desa di Kabupaten. Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Kantor Kecamatan Puding Besar selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan OPD kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel T-C. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat Tahun 2022

Kabupaten Bangka

OPD : Kecamatan Puding Besar

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	NIHIL				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tema Pembangunan :

“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”

Agenda Pembangunan (Prioritas Nasional)

Prioritas 1: Ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan Program Prioritas :

1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT).
2. Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
3. Peningkatan Ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan
4. Peningkatan Pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
5. Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan Koperasi
6. Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan investasi disektor riil dan industrialisasi
7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

Prioritas 2 : Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Program Prioritas :

1. Pembangunan Wilayah Sumatera
2. Pembangunan Wilayah Jawa - Bali
3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara

4. Pembangunan Wilayah Kalimantan
5. Pembangunan Wilayah Sulawesi
6. Pembangunan Wilayah Maluku

Prioritas 2 : Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Program Prioritas :

1. Pembangunan Wilayah Sumatera
2. Pembangunan Wilayah Jawa - Bali
3. Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara
4. Pembangunan Wilayah Kalimantan
5. Pembangunan Wilayah Sulawesi
6. Pembangunan Wilayah Maluku
7. Pembangunan Wilayah Papua

Prioritas 3 : Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Program Prioritas :

1. Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
2. Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Nasional Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
3. Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial;
4. Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas
5. Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda
6. Pengentasan Kemiskinan
7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

Prioritas 4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Program Prioritas :

1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter

2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia
3. Memperkuat Moderasi Beragama untuk mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial
4. Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter

Prioritas 5 : Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar

Program Prioritas :

1. Infrastruktur pelayanan dasar;
2. Infrastruktur Ekonomi;
3. Infrastruktur Perkotaan;
4. Energi dan Ketenagalistrikan
5. Transformasi digital;

Prioritas 6 : Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim

Program Prioritas :

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
2. Peningkatan ketahanan bencana dan iklim.; dan
3. Pembangunan rendah karbon.

Prioritas 7 : Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Program Prioritas :

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi birokrasi dan tata kelola;
5. Menjaga stabilitas keamanan Nasional.

Berdasarkan arah kebijakan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dimaksud, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Puding Besar adalah:

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan atau menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

Untuk mengaktualisasikan hal tersebut, maka Kecamatan Puding Besar memformulasikan dalam tujuan :

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan

2. Meningkatnya Reformasi Birokrasi PD

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka. Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian di dalam program dan tujuan tersebut, berdasarkan misi yang diemban Kantor Kecamatan Puding Besar, yaitu:

- a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
- b. Meningkatnya Upaya Pemberdayaan Masyarakat
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024.

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Puding Besar maka program-program yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 5 Program yaitu :

1. Penunjang Urusan Pemerintahan
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 adalah 11 kegiatan, sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Renja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat
9. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
10. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
11. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran Kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan

pada Tahun Anggaran 2024 adalah 28 Sub Kegiatan, sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
6. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
7. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
8. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
12. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
13. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
14. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
15. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor / Bangunan Lainnya
16. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
17. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
18. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

19. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
20. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
21. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
22. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
23. Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
24. Sub Kegiatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
25. Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
26. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
27. Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
28. Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024 antara lain meliputi:

Jumlah program dan kegiatan yang direncanakan di Rencana Kerja Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024 berjumlah 5 program, 11 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan

- a. lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan di Kecamatan Puding Besar
- b. total dana/pagu indikatif yang dibutuhkan adalah sebesar **Rp. 3.929.208.800.-**

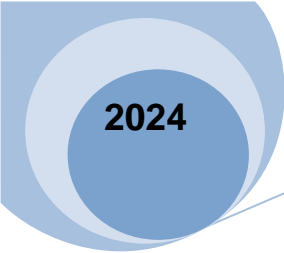
BAB. IV**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH****4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2024**

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Tahun 2024, Program dan Kegiatan tahun 2024 disusun berdasarkan :

- a. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026;
- b. RKPD Kabupaten Bangka 2024;
- c. Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Puding Besar Tahun 2024-2026.

Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2024, seperti yang tercantum dalam tabel berikut:

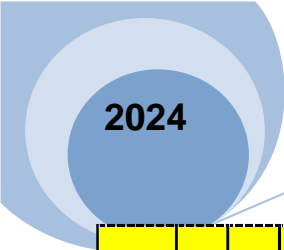
Tabel rencana program dan kegiatan Kantor Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka Tahun 2024 dapat dilihat pada lampiran tabel 4.1



RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2024 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN BANGKA

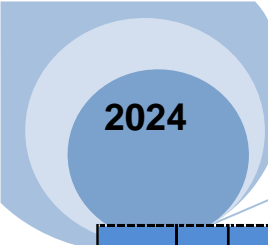
OPD : KECAMATAN PUDING BESAR

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
									Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
							Indeks Kepuasan Masyarakat		BB (90,00)	239.680.000,00			BB (92,25%)	244.680.000,00
							Persentase Masyarakat yang dilayani sesuai SOP		100,00%				100%	
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Layanan Administrasi yang Sesuai SOP		100%	15.000.000,00			100%	15.000.000,00
7	01	02	2	02		Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Layanan Administrasi yang tepat waktu		100%	15.000.000,00			100%	15.000.000,00
7	01	02	2	02	0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.P.Besar Kab.Bangka	12 laporan	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 laporan	15.000.000,00

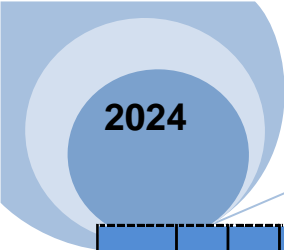


							Persentase Desa Mandiri		28,57%				57,14%	
7	01	03					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa/kelurahan yang masyarakatnya aktif dalam musrenbang		100%	117.530.000,00	-	100%	117.530.000,00
7	01	03						Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif		100%			100%	
7	01	03	2	01			Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam musrebang desa/kel/kecamatan		100%	117.530.000,00		100%	117.530.000,00
7	01	03	2	01				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina		100%	117.530.000,00		100%	
7	01	03	2	01	0001	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.P.Besar Kab.Bangka	49 lembaga	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	49 lembaga	10.000.000,00
7	01	03	2	01	0003	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.P.Besar Kab.Bangka	26 laporan	107.530.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	26 laporan	107.530.000,00
7	01	04					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif dalam menjaga trantibum		100%	14.150.000,00		100%	14.150.000,00
7	01	04	2	01			Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Terlaksananya koordinasi dengan Tomas/Toga/Topa		100%	14.150.000,00		100%	
7	01	04	2	01	0002	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.P.Besar Kab.Bangka	12 laporan	14.150.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 laporan	14.150.000,00

7	01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa		100%	93.000.000,00			100%	98.000.000,00
7	01	06	2	01		Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan	Persentase desa yang menindaklanjuti hasil monev		100%	93.000.000,00			100%	
7	01	06	2	01	0003	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.P.Besar Kab.Bangka	140 dokumen	73.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	140 dokumen	78.000.000,00
7	01	06	2	01	0009	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.P.Besar Kab.Bangka	1 dokumen	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Dokumen	10.000.000,00
7	01	06	2	01	0017	Sub Kegiatan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah laporan hasil koordinasi pendampingan desa di wilayahnya	Kec.P.Besar Kab.Bangka	1 Laporan	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Laporan	10.000.000,00
							Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah		30,27	3.689.528.800,00			31,00	3.774.261.900,00
							Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah		BB (73,20)				BB (73,50)	
7	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah		26,78	20.000.000,00			26,81	20.000.000,00
							Nilai Kinerja Pelaporan Perangkat Daerah		11,38				11,41	
7	01	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar		100%	20.000.000,00			100%	20.000.000,00
							Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar		100%				100%	
7	01	01	2	01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Kinerja yang disusun	Kec.P.Besar Kab.Bangka	6 Dokumen : Dokumen Renja, Dokumen Perubahan Renja, Perkin, Perkin Perubahan, Dokumen Rencana Aksi, Dokumen Renstra	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	6 Dokumen : Dokumen Renja, Dokumen Perubahan Renja, Perkin, Perkin Perubahan, Dokumen Rencana Aksi, Dokumen Renstra	10.000.000,00
7	01	01	2	01	0006	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.P.Besar Kab.Bangka	4 Laporan : Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah, Laporan LKPJ Perangkat Daerah, Dokumen Laporan Tahunan Perangkat Daerah, Dokumen LPPD	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	4 Laporan : Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah, Laporan LKPJ Perangkat Daerah, Dokumen Laporan Tahunan Perangkat Daerah, Dokumen LPPD	10.000.000,00



							Persentase temuan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah dalam LHP BPK-RI		0%				0%	
7	01	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar		100%	2.394.477.200,00			100%	2.394.477.200,00
7	01	01	2	02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.P.Besar Kab.Bangka	19 Orang/14 bulan Gaji (15 Laki-laki dan 4 Perempuan)	2.374.477.200,00	Dana Alokasi Umum	P1	19 Orang/14 bulan Gaji (15 Laki-laki dan 4 Perempuan)	2.374.477.200,00
7	01	01	2	02	0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kec.P.Besar Kab.Bangka	12 dokumen	15.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 dokumen	15.000.000,00
7	01	01	2	02	0007	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Kec.P.Besar Kab.Bangka	42 Laporan (12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, 12 Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan, 2 Dokumen Laporan Aset Semesteran, 12 Dokumen Laporan Persediaan Bulanan, 2 Dokumen Laporan Semesteran SKPD, 2 Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran)	5.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	42 Laporan (12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, 12 Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan, 2 Dokumen Laporan Aset Semesteran, 12 Dokumen Laporan Persediaan Bulanan, 2 Dokumen Laporan Semesteran SKPD, 2 Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran)	5.000.000,00



							Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah		61,25				62,45	
7	01	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengenakan Atribut Lengkap		100%	87.420.500,00			100%	87.420.500,00
							Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Kepegawaian		100%				100%	
							Persentase Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		52,94%				52,94%	
7	01	01	2	05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kec.P.Besar Kab.Bangka	5 Paket (Pakaian Olah Raga 16 Stel, PDH 40 Stel, Paskibraka 8 Stel, Pakaian Olahraga Paskibraka 10 Stel, Pakaian Batik STQ 55 Stel)	40.350.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	5 Paket (Pakaian Olah Raga 16 Stel, PDH 40 Stel, Paskibraka 8 Stel, Pakaian Olahraga Paskibraka 10 Stel, Pakaian Batik STQ 55 Stel)	40.350.000,00
7	01	01	2	05	0003	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec.P.Besar Kab.Bangka	11 Dokumen (Absensi, Kenaikan Pangkat, Berkala, SKP, Penilaian SKP, Cuti/Izin, DUK, Penghargaan, Pensiun, LHKASN/LHKPN, KP4)	10.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	11 Dokumen (Absensi, Kenaikan Pangkat, Berkala, SKP, Penilaian SKP, Cuti/Izin, DUK, Penghargaan, Pensiun, LHKASN/LHKPN, KP4)	10.000.000,00
7	01	01	2	05	0009	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kec.P.Besar Kab.Bangka	4 Orang (2 Orang Laki-Laki dan 2 Orang Perempuan)	37.070.500,00	Dana Alokasi Umum	P1	4 Orang (2 Orang Laki-Laki dan 2 Orang Perempuan)	37.070.500,00

							Indeks Kepuasan Pelayanan Jasa Internal Perangkat Daerah		3				3	
7	01	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum di perangkat daerah		100%	271.600.000,00			100%	278.800.000,00
7	01	01	2	06	0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.P.Besar Kab.Bangka	14 laporan(Ada Tambahhan Rembug Stunting	157.800.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	14 laporan(Ada Tambahhan Rembug Stunting	165.000.000,00
7	01	01	2	06	0010	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec.P.Besar Kab.Bangka	12 dokumen	56.900.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 dokumen	56.900.000,00
7	01	01	2	06	0011	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec.P.Besar Kab.Bangka	12 dokumen	56.900.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 dokumen	56.900.000,00
7	01	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	574.931.100,00			100%	602.114.200,00
7	01	01	2	08	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec.P.Besar Kab.Bangka	12 Laporan	447.376.545,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	474.392.790,00
7	01	01	2	08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.P.Besar Kab.Bangka	12 Laporan	39.854.555,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	40.021.410,00
7	01	01	2	08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.P.Besar Kab.Bangka	12 Laporan	87.700.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	12 Laporan	87.700.000,00

							Persentase BMD Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik		100%				100%	
7	01	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penambahan aset perangkat daerah		27,46%	229.650.000,00			21,85%	280.000.000,00
7	01	01	2	07	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Kec.P.Besar Kab.Bangka	2 Unit Motor	70.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Unit	70.000.000,00
7	01	01	2	07	0005	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kec.P.Besar Kab.Bangka	20 Unit	46.650.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	20 Unit	52.000.000,00
7	01	01	2	07	0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec.P.Besar Kab.Bangka	9 Unit	38.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	9 Unit	40.000.000,00
7	01	01	2	07	0009	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Kec.P.Besar Kab.Bangka	1 Unit	75.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 Unit	118.000.000,00
7	01	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara		18,91%	111.450.000,00			18,91%	111.450.000,00
7	01	01	2	09	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec.P.Besar Kab.Bangka	2 Unit Mobil, 6 Unit Motor	68.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	2 Unit Mobil, 6 Unit Motor	68.000.000,00
7	01	01	2	09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec.P.Besar Kab.Bangka	27 unit	18.450.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	27 unit	18.450.000,00
7	01	01	2	09	0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.P.Besar Kab.Bangka	1 unit	25.000.000,00	Dana Alokasi Umum	P1	1 unit	25.000.000,00
JUMLAH										3.929.208.800,00				4.018.941.900,00

CAMAT PUDING BESAR,



ARIE PAMUNGKAS, S.STP.M.Si
PEMBINA / IV A
NIP. 19841130 200212 1 002

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Kantor Kecamatan Puding besar Kabupaten Bangka Tahun 2024 secara umum memuat rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lingkup OPD Kecamatan Puding besar Kabupaten Bangka pada Tahun 2024 serta mengevaluasi perencanaan program dan kegiatan Tahun 2021 dalam Tabel Evaluasi Renja Tahun 2022.

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan pudding besar Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Evaluasi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan pudding besar Tahun 2019-2023. Rancangan Akhir Renja Kecamatan Puding besar Tahun 2024 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik pada skala Pemerintahan Kabupaten (yang sudah melakukan sinkronisasi dengan prioritas pembangunan propinsi dan nasional), baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang. Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dan Unit Kerja Kecamatan dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan pudding besar Tahun 2024.

Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan penganggaran maka kaidah pelaksanaan Rencana Kerja OPD Kecamatan pudding besar Kabupaten Bangka harus mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah membutuhkan mekanisme yang sistematis dan terukur agar dapat menjadi acuan dalam penentuan program dan kegiatan pembangunan daerah, untuk itu diperlukan dokumen perencanaan kerja dari setiap OPD dalam lingkup Kabupaten Bangka berupa Rencana kerja dari masing-masing OPD

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Puding Besar Tahun 2024 ini kami buat semoga dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya PD Kecamatan Puding Besar Kabupaten Bangka.

Puding Besar, April 2023
CAMAT PUDING BESAR



ARIE PAMUNGKAS,S.STP,M.Si
PENATA TK.I
NIP. 19841130 200212 1 002

**JADWAL TENTATIF
TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

NO	TAHAPAN	WAKTU	KET
1	SK Tim Penyusun Renja PD	6 Desember 2022	
2	Penyusunan Ranwal Renja PD Tahun 2024	6 Desember 2022 - 31 Januari 2023	
3	Musrenbang Tk. Desa/ Kel	9-31 Januari 2023	
4	Musrenbang RKPD Tk. Kecamatan	6-9 Februari 2023	
5	SE Bupati tentang Penyempurnaan Ranwal Renja-PD	14 Februari 2023	
6	Penyempurnaan Ranwal Renja PD sesuai SE Bupati	14 Februari- 9 Maret 2023	
7	Forum Lintas Perangkat Daerah	21-22 Februari 2023	
8	Verifikasi Draft Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	6-9 Maret 2023	
9	Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten	13-15 Maret 2023	
10	Penetapan Perbup tentang RKPD Kabupaten Bangka	3 Juli 2023	
11	Surat Sekda tentang penyempurnaan Ranhir Renja PD	3 Juli 2023	
12	Penyampaian Ranhir Renja PD kepada Bappeda	5-12 Juli 2023	
13	Verifikasi Ranhir Renja PD	6-26 Juli 2023	
14	Penyusunan Rancangan Perbup tentang Renja PD	27-28 Juli 2023	
15	Penyampaian seluruh Ranhir Renja PD kepada Bupati melalui Sekda untuk ditetapkan dengan Perkada	31 Juli 2023	
16	Penetapan Perkada tentang Renja PD Tahun 2024	1 Agustus 2023	

